

**PENGARUH PERAN INSPEKTORAT PEMBANTU KOTA DAN IMPLEMENTASI
GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN
KECURANGAN PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2014**

***THE INFLUENCE OF THE INSPECTORATE ROLE AND THE IMPLEMENTATION
OF GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE ON FRAUD PREVENTION IN EAST
JAKARTA 2014***

Innosanto Beawiharta

Universitas Telkom

innosantob@gmail.com

15/10-2014

Sri Rahayu Universitas Telkom

sriahayu@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Kecurangan adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Untuk mencegah atau mengurangi tindakan kecurangan tersebut terutama yang terjadi di pemerintahan maka diperlukan peran Inspektorat Pembantu Kota sebagai fungsi pengawas, dan implementasi *good government governance*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh peran Inspektorat Pembantu Kota dan implementasi *good government governance* terhadap pencegahan kecurangan. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh dengan sampel 30 responden yang bekerja di Inspektorat Pembantu Kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji hipotesis dan model regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah peran Inspektorat Pembantu Kota dan implementasi *good government governance* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Secara parsial, peran Inspektorat Pembantu Kota dan implementasi *good government governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Kata Kunci : *Good government governance*, Inspektorat Pembantu Kota, Pencegahan kecurangan

ABSTRACT

Fraud is an act against the law or violated committed by people from within and outside the organization to gain personal advantage or group that may directly or indirectly harm others. To prevent or reduce the amount of fraud that occurs mainly in the government then takes the role of Inspektorat Pembantu Kota as watchdog function, and implementation of good government governance. The purpose of this study is to analyze the effect of Inspektorat Pembantu Kota and implementation of good government governance on fraud prevention. The sampling technique used is saturated sampling using 30 respondents in Inspektorat Pembantu Kota. The data used in this study is primary data. The analytical method used is descriptive statistics, hypothesis testing and multiple linear regression models. The result of this study are simultaneously role of the Inspektorat Pembantu Kota and Implementation of good government governance have significant influence on fraud prevention, while the partial each Role of Inspektorat Pembantu Kota and Implementation of good government governance has significant influence on fraud prevention.

Keywords : Fraud Prevention, Good Government Governance, Inspectorate.

1. Pendahuluan

Tuntutan dalam perwujudan *good governance* di Indonesia yang semakin meningkat berimplikasi pada sistem pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan, salah satunya dengan cara mengoptimalkan aparat pengawas pemerintah, yaitu inspektorat. Dengan adanya peran optimal yang dijalankan inspektorat maka perubahan di bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat terwujud, sehingga praktik-praktik kecurangan dapat berkurang (Rendika, 2013). Inspektorat adalah alat kontrol pemerintah yang berbentuk badan dan dipimpin oleh seorang kepala badan terutama dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana tercantum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2004 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Inspektorat.

Menghadapi kemungkinan terjadinya *fraud*, tindakan yang paling baik adalah dengan berusaha menghindari atau mencegahnya. Ada beberapa upaya komprehensif dalam memerangi *fraud*, yaitu: pencegahan, pendeteksian bila telah ditemukan gejala kecurangan, investigasi bila telah diyakini kecurangan sedang atau telah terjadi, dan tindakan hukum. Sedangkan pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan: membina, memelihara, dan menjaga mental/moral pegawai senantiasa bersikap jujur, disiplin, setia, beretika, dan berdedikasi dan membangun sistem pengendalian internal yang efisien dan efektif (STAN dalam Taufik, 2010).

Good Government Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung-jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara dominan-dominan pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berhubungan dan menjalankan fungsinya masing-masing. Dalam melakukan tugasnya, inspektorat tidak boleh memihak kepada siapapun, inspektorat memiliki wewenang penuh untuk memeriksa dan mengamati setiap bagian dalam pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya inspektorat dapat bertindak seobjektif dan seefektif mungkin.

Definisi kecurangan menurut Sukrisno (2009:6) merupakan suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kecurangan dapat menyebabkan timbulnya kerugian dari tempat melakukan tindakan *fraud*. Hal tersebut dikarenakan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan

yang berhubungan dengan kebenaran karena dilakukan secara sengaja oleh pihak yang ingin memperoleh keuntungan yang bukan merupakan hak pelakunya.

Kasus korupsi yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta diantaranya terdapat di Wilayah Jakarta Timur yang menyeret beberapa pejabat perangkat daerah Kelurahan terkait kasus korupsi. *Fraud* dapat diminimalisir dengan adanya *good government governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, efisien, dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif diantara unsur-unsur negara, swasta dan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara dalam Widilestariningtyas, 2012).

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Mengetahui peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi *Good Government Governance* di Kota Administrasi Jakarta Timur; (2) Membuktikan secara empiris apakah peran Inspektorat Daerah dan Implementasi *Good Government Governance* secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di Kota Administrasi Jakarta Timur; (3) membuktikan secara empiris apakah peran Inspektorat Daerah dan Implementasi *Good Government Governance* secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan teori bagi peneliti selanjutnya. Bagi Inspektorat Pembantu Kota diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan perbaikan dan koreksi yang diperlukan, sehingga dapat menunjukkan sistem kinerja yang optimal.

2. Tinjauan Pustaka

a. Inspektorat Pembantu Kota

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2004 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Inspektorat, bahwa Inspektorat adalah lembaga teknis daerah yang berbentuk badan, merupakan unsur penunjang pemerintah daerah, dibidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Pasal 13 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Pembantu mempunyai fungsi sebagai a) Pengusulan program pengawasan di wilayah, b) Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan, c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

b. Good Government Governance

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2001) dalam Widilestariningtyas (2012), *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung-jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara dominan-dominan pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berhubungan dan menjalankan fungsinya masing-masing. Azas *Good Governance* menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 Tentang Azas Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

c. Kecurangan (*Fraud*)

Definisi kecurangan menurut *Statements of Internal Standard Auditing* No.3 dalam Prasetyo (2002) adalah kecurangan meliputi serangkaian ketidakbiasaan dan atau tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Kecurangan dapat dilakukan untuk kepentingan atau atas kerugian organisasi dan oleh orang di luar atau di dalam organisasi. Menurut AICPA dalam Arens et al. (2008) mengidentifikasi tiga unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan, yaitu: 1) Budaya jujur dan etika yang tinggi. 2) Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi resiko kecurangan. 3) Pengawasan oleh Komite Audit.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai pengusulan program pengawasan di wilayah, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Dengan adanya peran optimal yang dijalankan inspektorat maka perubahan di bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat terwujud, sehingga praktik-praktik kecurangan dapat berkurang. Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi.

Azas Good Governance menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 Tentang Azas Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Penerapan *good government governance* yang berjalan dengan baik akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yang jauh dari praktik kecurangan. Penelitian Widilestariningtyas (2012) juga menyimpulkan bahwa pengaruh *good government governance* terhadap pencegahan *fraud* adalah cukup, hal ini berarti jika *good government governance* belum dilaksanakan dengan baik maka pencegahan *fraud* belum dapat terlaksana dengan baik.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif verikatif bersifat kausalitas yang menguji pengaruh antara peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi *Good Government Governance* sebagai variabel independen dengan Pencegahan Kecurangan sebagai variabel dependen. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah peran Inspektorat Pembantu Kota (X_1) dan Implementasi *Good Government Governance* (X_2). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pencegahan Kecurangan (Y).

Teknik *sampling* yang digunakan adalah *Nonprobability sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah Inspektorat Pembantu Kota Jakarta Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang ada di Inspektorat Pembantu Kota sebanyak 30 orang. Untuk dapat mengetahui tentang peran Inspektorat Pembantu Kota, Implementasi *Good Government Governance*, dan Pencegahan Kecurangan maka dilakukan pengujian Statistik Deskriptif dengan cara melakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner. Dari jawaban tersebut kemudian disusun kriteria penilaian untuk setiap item pertanyaan berdasarkan persentase.

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan tersebut benar-benar valid dan reliable. Untuk uji validitas digunakan bantuan software SPSS versi 20. Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reliabilitas. Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas residual, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan metode analisis menggunakan analisis regresi berganda, uji F, koefisien determinasi dan uji T.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Peran Inspektorat Pembantu Kota

Tanggapan responden mengenai Peran Inspektorat Pembantu Kota berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar menunjukkan bahwa Peran Inspektorat Pembantu Kota di Jakarta Timur telah dilaksanakan dengan sangat baik dengan persentase 85,60%. Hal ini terlihat dari telah dilaksanakannya pengusulan program pengawasan di wilayah yang dilaporkan kepada Inspektur, melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal maupun aparat pengawasan eksternal pemerintah, melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah secara independen dan melalui prosedur pengawasan yang telah dibuat yang kemudian hasil pengawasan dilaporkan kepada Inspektur, serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang dilaporkan kepada Inspektur Provinsi dan dilakukan evaluasi secara periodic atas tugas pengawasan tersebut.

b. Implementasi *Good Government Governance*

Tanggapan responden mengenai Implementasi *Good Government Governance* berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar menunjukkan bahwa Implementasi *Good Government Governance* telah dilaksanakan dengan sangat baik dengan persentase 84,93%. Hal ini terlihat dari telah dilaksanakannya kepastian hukum bagi pegawai maupun pimpinan yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi, telah diterapkan mengenai tertib penyelenggaraan Negara dalam hal melaksanakan pekerjaan telah sesuai dengan SOP yang berlaku, telah diterapkannya aspek kepentingan umum dalam hal menyusun kebijakan yang pro kepada masyarakat, telah diterapkannya aspek keterbukaan dalam hal kegiatan pengawasan dan pemeriksaan telah disampaikan kepada masyarakat secara terbuka, telah diterapkannya aspek proporsionalitas dalam hal pengisian jabatan telah sesuai dengan latar belakang akademik, telah diterapkannya aspek profesionalitas dalam hal kode etik dalam bekerja, kemudian telah diterapkannya aspek akuntabilitas serta diterapkannya aspek efektifitas dan efisiensi dalam hal tidak adanya tumpang tindih wewenang dalam unit kerja.

c. Pencegahan Kecurangan

Tanggapan responden mengenai Pencegahan Kecurangan berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar menunjukkan bahwa Pencegahan Kecurangan telah dilaksanakan dengan sangat baik dengan persentase 84,05%. Hal ini terlihat dari telah dilaksanakannya *setting tone at the top* mengenai sosialisasi kode etik kepada seluruh pegawai, melaksanakan rekutmen dan promosi karyawan yang tepat dengan melaksanakan kebijakan penyaringan pegawai yang efektif, telah melaksanakan kebijakan pelatihan dengan memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai mengenai pemahaman pengendalian internal secara berkala, telah menerapkan indikator mengidentifikasi dan mengukur resiko kecurangan seperti memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam mengidentifikasi indikator terjadinya *fraud*, kemudian telah menerapkan indikator pengurangan resiko kecurangan dengan selalu menerapkan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi.

Hasil Uji Asumsi Klasik yaitu hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov Test* adalah sebesar 0,565 dengan signifikan 0,907. Berarti dapat dinyatakan berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut (lampiran tabel 1). Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variable bebas kurang dari 10 dan tolerance value berada diatas 0,1 (lampiran tabel 2). Uji heteroskedastisitas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas (lampiran tabel 3). Dari pengolahan data statistik, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -12,060 + 0,886X_1 + 0,467X_2$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran inspektorat pembantu kota berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dan implementasi *good government governance* juga berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peran inspektorat pembantu kota dan implementasi *good government governance* di Jakarta Timur maka kecurangan yang terjadi dalam pemerintah daerah tersebut dapat ditekan sebaik mungkin.

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara bersama-sama variable independen mampu menjelaskan variable dependen secara baik. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($58,543 > 3,350$) pada tingkat signifikan $0,00 < 0,05$ (lampiran tabel 4). Hal ini berarti bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan. Untuk pengujian koefisien determinasi, nilai *R Square* menunjukkan bahwa besarnya kontribusi variable dependen adalah sebesar 81,3% sedangkan sisanya 18,7% ditentukan oleh variable lain yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini (lampiran tabel 5). Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen secara parsial. Dapat dilihat nilai signifikansi untuk variabel peran inspektorat pembantu kota adalah $0,00 < 0,05$. Nilai t_{hitung} untuk variabel peran inspektorat pembantu kota adalah 4,374. Hal ini menunjukkan bahwa peran inspektorat pembantu kota memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan. Sehingga hipotesis 2 diterima. Untuk variabel implementasi *good government governance* adalah $0,03 < 0,05$. Nilai t_{hitung} untuk variabel implementasi *good government governance* adalah 3,219. Hal ini menunjukkan implementasi *good government governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, sehingga hipotesis 3 diterima.

Untuk mengungkapkan pengaruh variable yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda, model ini menggunakan dua variable independen yaitu peran inspektorat pembantu kota (X_1) dan implementasi *good government governance* (X_2) dan satu variable dependen yaitu pencegahan kecurangan (Y). hasil pengolahan data yang menjadi dasar dalam pembentukan model penelitian ini dapat ditunjukkan dalam (lampiran tabel 6).

Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi *Good Government Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan secara Simultan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama – sama peran inspektorat pembantu kota dan implementasi *good government governance* berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi peran inspektorat pembantu kota dan implementasi *good government governance*, maka tindakan pencegahan kecurangan akan semakin meningkat, dengan kata lain Hipotesis Pertama (H_1) diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Taufik (2011) dan Widiliestariningsy (2012) yang masing - masing menyatakan bahwa peran Inspektorat Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan dan pengaruh *good government governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota terhadap Pencegahan Kecurangan di Kota Jakarta Timur

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran inspektorat pembantu berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi peran inspektorat pembantu kota, maka tindakan pencegahan kecurangan akan semakin meningkat, dengan kata lain Hipotesis Kedua (H_2) diterima. Dengan adanya peran optimal yang dijalankan inspektorat maka perubahan di bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat terwujud, sehingga praktik-praktik kecurangan dapat berkurang. Jadi semakin baik Peran Inspektorat Pembantu Kota dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka akan semakin meningkat pula tindakan Pencegahan Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah. Dengan demikian hipotesis kedua yaitu Peran Inspektorat Pembantu Kota berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Taufik (2011) dan Rendika (2013) yang menyatakan bahwa Peran Inspektorat Pembantu Kota berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

Pengaruh Implementasi *Good Government Governance* terhadap Pencegahan Kecurangan Di Jakarta Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *good government governance* berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi implementasi *good government governance*, maka tindakan pencegahan kecurangan akan semakin meningkat, dengan kata lain Hipotesis Ketiga (H_3) diterima. Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi. Penerapan *good government governance* yang berjalan dengan baik akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yang jauh dari praktik kecurangan. Dengan demikian hipotesis yang kedua yaitu Implementasi *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Gusnardi (2011), Widilestariningtyas (2012) dan Husna (2013) yang menyatakan bahwa Implementasi *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menggunakan deskriptif, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: (a) Peran Inspektorat Pembantu Kota di Jakarta Timur telah dilakukan dengan sangat baik yaitu dengan persentase sebesar 85,60%. (b) Implementasi *good government governance* oleh Inspektorat Pembantu Kota Di Jakarta Timur telah dilaksanakan dengan sangat baik yaitu dengan persentase sebesar 84,93%. (c) Pencegahan kecurangan yang dilakukan Inspektorat Pembantu Kota di Jakarta Timur telah dilakukan dengan sangat baik yaitu dengan persentase sebesar 84,05%.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi *Good Government Governance* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi peran inspektorat pembantu kota dan implementasi *good government governance*, maka tindakan pencegahan kecurangan akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa Peran Inspektorat Pembantu Kota berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa semakin tinggi peran inspektorat pembantu kota, maka tindakan pencegahan kecurangan akan semakin meningkat. Dan implementasi *good government governance* berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi implementasi *good government governance*, maka tindakan pencegahan kecurangan akan semakin meningkat.

Saran

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel independen yang berbeda seperti pengendalian internal untuk mengukur pencegahan kecurangan. Untuk pemerintah Kota Jakarta Timur sebaiknya meningkatkan independensi dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan meningkatkan aspek keterbukaan kepada masyarakat umum mengenai hasil kegiatan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Soekrisno. (2009). *Auditing*. Jilid II. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Arens, Alvin A, Loebebecke, James K. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terpadu*. Edisi Kedua Belas. Jakarta : Erlangga.

Gusnardi. (2011). *Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan terhadap Pencegahan Kecurangan*. Ekuitas Vol. 15 No. 1 Maret 2011:130-146

Husna, Fitriatil. (2013). *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas dan Implementasi Good Corporate Governance terhadap Kecurangan*. Jurnal Akuntansi UNP, Vol.1, No.2 2013.

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Prasetyo, et al. (2003). *Fraud Prevention and Investigation*. Peak Indonesia : Jakarta.

Rendika, Michel. (2013). *Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Inspektorat terhadap Penyalahgunaan Aset*. Jurnal Akuntansi UNP, Vol.1, No.3 2013.

Taufik, Taufeni. (2010). *Pengaruh Internal Auditor, Eksternal Auditor dan DPRD terhadap Pencegahan Kecurangan*. Pekbis Jurnal, Vol.2, No.2 Juli 2010: 292-300.

Taufik, Taufeni. (2011). *Pengaruh Peran Inspektorat Daerah terhadap Pencegahan Kecurangan*. Pekbis Jurnal, Vol.3, No.2 Juli 2011: 512-520.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Widilestaringtyas, Ony. (2012). *Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Good Government Governance terhadap Pencegahan Fraud dan Implikasinya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Indonesian Journal of Economics and Business*, Vol. 2 No. 2.

Lampiran

Tabel 1
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal	Mean	190.53
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	15.422
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.103
	Negative	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		.565
Asymp. Sig. (2-tailed)		.907

a. Test distribution is Normal.

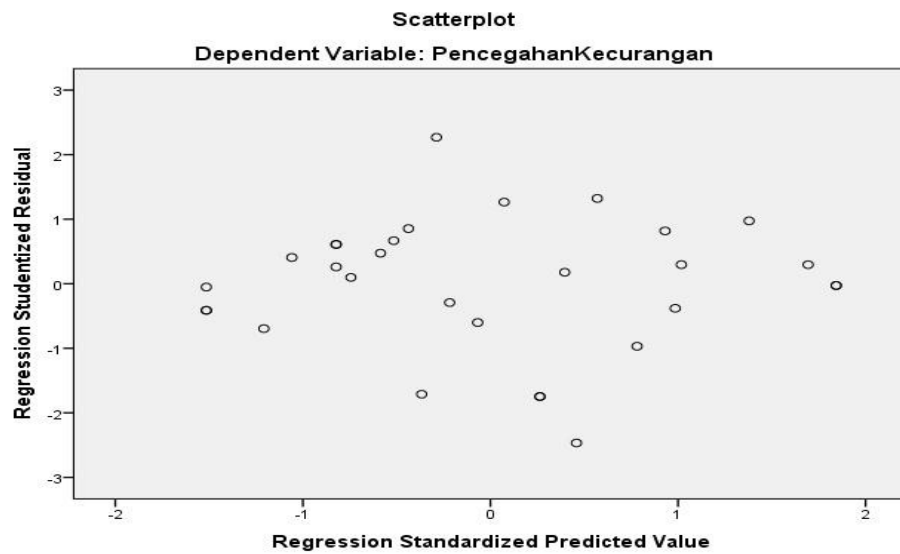
b. Calculated from data.

Tabel 2
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	-12.060	7.353		-1.640	.113		
1 Peran Inspektorat Pembantu Kota	.886	.203	.554	4.374	.000	.433	2.309
Good Government Governance	.467	.145	.407	3.219	.003	.433	2.309

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Tabel 3
Uji Heteroskedastisitas



Tabel 4
Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1021.813	2	510.916	58.543	.000 ^b
Residual	235.635	27	8.727		
Total	1257.467	29			

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

b. Predictors: (Constant), *Good Government Governance*, Peran Inspektorat Pembantu Kota

Tabel 5
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.901 ^a	.813	.799	2.954

a. Predictors: (Constant), *Good Government Governance*, Peran Inspektorat Pembantu Kota

b. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan

Tabel 6
Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-12.060	7.353		-1.640	.113
1 Peran Inspektorat Pembantu Kota	.886	.203	.554	4.374	.000
Good Government Governance	.467	.145	.407	3.219	.003

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan